Bab I

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Sejarah menyebutkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang pada awalnya tidaklah seharmonis seperti sekarang. Pada awal kedatangan Jepang di Indonesia saat Indonesia masih dalam penjajahan Belanda telah membawa harapan bagi rakyat Indonesia yang sangat ingin lepas dari penjajahan Belanda dan menjadi suatu negara yang merdeka. Rakyat Indonesia berpikir bahwa Jepang lah yang akan membantu Indonesia lepas dari penjajahan Belanda. Karena itu rakyat Indonesia sangat senang menerima kedatangan Jepang dan percaya terhadap Jepang. Tetapi rakyat Indonesia terlalu lugu untuk hal ini. Karena mereka tidak tahu bahwa tujuan utama Jepang datang ke Indonesia bukanlah untuk itu. Tetapi mempunyai tujuan dan maksud tetentu. Yaitu ingin menjadikan wilayah Indonesia sebagai kepentingan untuk keperluan industrinya. Hal inilah yang kemudian memacu hubungan yang asimetris diantara keduanya.

Setelah merdekanya Indonesia, Jepang memulai kembali membina hubungannya dengan Indonesia secara diplomatik. Sejak ditandatanganinya perjanjian damai pada 15 April 1958, cukup banyak persetujuan dan pertukaran nota yang melandasi hubungan bilateral antara Saudara Muda dengan Saudara Tua (sebutan Jepang dengan Indonesia). Diperkirakan 200 pertukaran nota antara kedua negara yang mengatur mengenai kerja

Hubungan ini tidaklah mulus – mulus saja pada awalnya, bahkan juga mengalami berbagai hambatan dan rintangan dalam prosesnya. Namun dengan berbagai upaya diplomatik dan pemecahan masalah secara bersama di antara kedua negara, Indonesia dan Jepang akhirnya berhasil untuk menstabilisasikan hubungan dan menjadikannya semakin harmonis. Hingga pada 20 Januari 2008, Indonesia dan Jepang memperingati Tahun Emas hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik inipun kemudian terus meningkat dalam berbagai bidang secara positif hingga di masa sekarang.

Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$23,6 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$6,5 miliar.[1] Sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia tahun 2007. Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dan lain-lain. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.

Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, memang belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang

---

[1] F. Isnaeni, Hendra. *Perspektif Hubungan Bilateral Indonesia – Jepang*. 2011. International News.

tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama diantara negara – negara asing lainnya Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia.

Namun sebenarnya hubungan ekonomi yang terjadi antara Indonesia dan Jepang memiliki kaitan yang erat pula dengan hubungan politik antara keduanya. Karena pada prinsipnya, perekonomian yang stabil di suatu negara akan berpengaruh pula pada kestabilan politiknya. Perisai ekonomi yang dimiliki Jepang merupakan salah satu senjata politiknya, termasuk kepada Indonesia Politik ekonomi yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia inilah yang kemudian memunculkan kerjasama pemberian Official Development Assistance (ODA) untuk Indonesia. Pada filosofinya, ODA adalah bantuan kompensasi dari Jepang terhadap negara – negara bekas jajahannya sewaktu Perang Dunia II, termasuk Indonesia. ODA adalah salah satu yang paling penting dan krusial bagi kelangsungan hubungan kerjasama Jepang dengan Indonesia. Bantuan Pembangunan Pemerintah Jepang ini dimulai tahun 1954, dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi, transportasi, pertanian, dan kesehatan. Bantuan ODA Jepang yang telah memberikan kontribusi besar melalui di bidang pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur sosial ekonomi. Misalnya, pada saat krisis ekonomi melanda Asia sejak Agustus 1997, Jepang membantu

perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain-lain. Begitu pula ketika gempa besar dan tsunami di Aceh, Indonesia pada Desember 2004, Jepang menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar US$640 juta. Secara kumulatif sampai 2006, bantuan Jepang kepada Indonesia berjumlah US$29,5 miliar. Dengan rincian: Pinjaman Yen sebesar 125.2 miliar Yen; Bantuan Hibah sebesar 5.4 miliar Yen; dan Kerjasama Teknik sebesar 7,8 miliar Yen.[2] Karena itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara donor terbesar, demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Janji Jepang mengenai rencana pemberian ODA yang telah ditetapkan untuk membantu Indonesia di dalam proses kemandiriannya diprioritaskan pada 3 pilar utama, yaitu bantuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan oleh sektor swasta, bantuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan bantuan terhadap perdamaian dan keamanan. Ketiga pilar bantuan ini sudah dimulai sejak November 2004 dan dilaksanakan secara berkala tiap tahunnya.[3]

Pada 11 Maret 2011, bencana alam Gempa bumi dengan kekuatan 8,9 SR meluluh lantakkan Jepang. Hal ini merupakan fenomena alam yang sangat mengejutkan bagi negara matahari terbit itu. Gempa yang berpusat pada kedalaman 24 km sebelah timur laut Jepang juga memicu gelombang Tsunami yang sangat dahsyat dan mampu menyapu semua yang ada didepannya. Gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter yang

---

[2] *Sejarah Bantuan ODA Jepang di Indonesia*. 2011. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm., diakses tanggal 21 November 2011.

[3] *Sektor Prioritas dan Kebijakan Dasar Bantuan ODA Jepang di Indonesia*. 2011. http://www.id.emb-

melanda Jepang itu adalah gempa terbesar yang pernah terjadi di negara tersebut. Sedangkan untuk ukuran dunia, gempa yang terjadi di negara Sakura itu merupakan gempa ketujuh terbesar dalam catatan Survei Geologi Amerika Serikat (U.S. Geological Survey, USGS)[4]

Gelombang tsunami yang muncul beberapa saat setelah terjadinya gempa menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, gelombang yang sangat dahsyat yang melanda Miyagi dan fukushima di timur laut Jepang menyapu ratusan perumahan di sekitar pantai, menghancurkan lahan pertanian, sarana dan prasarana jalan, jembatan dan pelabuhan, dan juga merusak pabrik-pabrik di kawasan industri. Bencana Gempa ini menyebabkan 9.487 orang meninggal dunia dan 15.617 orang hilang dan belum diketahui keberadaannya, namun dipastikan meninggal oleh pihak kepolisian Jepang. Sedangkan sebanyak 360.000 orang dievakuasi dari tempat terjadinya bencana dan ditempatkan ditempat-tempat pengungsian di seluruh negeri.[5]

Tidak hanya itu saja, bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang tersebut menyebabkan kerugian finansial sebesar 235 miliar dolar AS (Rp2.053 triliun) atau 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) negeri itu, namun rekonstruksi untuk pemulihan pasca bencana baru akan dilakukan tahun ini[6]. Jumlah kerugian ekonomi yag

---

[4] Is, Bakkarudin. *Gempa Terbesar Melanda Jepang dalam Satu Abad Terakhir.* 2011. Kompasiana. http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/03/12/gempa-terbesar-melanda-jepang-dalam-satu-abad-terakhir/, diakses tanggal 22 November 2011.

[5] *25 Ribu Lebih Korban Meninggal Gempa dan Tsunami Jepang.* 2011. NHK World. http://www.berita8.com/read/2011/03/24/2/40268/25-Ribu-Lebih-Korban-Meninggal-Gempa-dan-Tsunami-Jepang, diakses tanggal 22 November 2011.

[6] *Gempa & Tsunami Jepang Telan Kerugian Rp2.053 Triliun.* 2011.

diderita Jepang tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, hal ini tentu menjadi pukulan yang hebat bagi kondisi ekonomi Jepang dan eksistensi Jepang di asia sebagai raksasa ekonomi yang saat ini sudah kalah oleh perkembangan ekonomi luar biasa china. Akan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa bangkit dari keterpurukan Jepang pasca bencana alam ini.

Efek negatif yang ditimbulkan oleh bencana gempa dan tsunami Jepang memang telah membawa banyak kerugian bagi negara ini, hampir semua sektor penting dari negara ini terkena dampak buruk dari bencana gempa dan tsunami tersebut, termasuk juga sektor industri Jepang, baik industri berskala dalam negeri maupun industri yang memiliki skala internasional. Hal ini bisa dilihat dari sektor industri otomotif Jepang yang mengalami penurunan yang sangat signifikan, baik dalam hal produksi maupun ekspor. Produksi dan ekspor mobil Jepang mengalami penurunan lebih dari dari 60% pada April pasca gempa dahsyat 11 Maret dan tsunami[7]. Hal ini disebabkan oleh rusaknya infrastruktur industri raksasa otomotif karena tersapu dahsyatnya gelombang tsunami yang menghantam Jepang pada bulan Maret lalu. Pabrikan Toyota dan Nissan motor merupakan industri otomotif Jepang yang mengalami kerugian besar atas bencana tsunami tersebut. Kondisi ini menyebabkan produsen otomotif Jepang ini menutup sementara pabrik-pabrik mereka dan menghentikan produksi untuk sementara waktu sampai kondisi Jepang mulai membaik.

[7] *Produksi & Ekspor Mobil Jepang Turun Pasca-Tsunami*. 2011.

Namun dibalik tragedi ini ada sebuah fenomena unik yang muncul, yaitu bahwa pemberian bantuan ODA (Official Development Assistance) dari Jepang untuk Indonesia masih berlangsung dan tetap stabil. Gempa bumi dan Tsunami yang terjadi ternyata tidak membuat pemerintah Jepang mengurangi dana bantuannya kepada Indonesia. Sebagaimana hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta, usai pertemuan dengan menlu Indonesia Marty Natalegawa di kemlu, pada Rabu, 16 Maret 2011, bahwa bencana tsunami tidak akan merubah anggaran Bantuan Resmi Pembangunan (ODA) yang setiap tahunnya diberikan kepada Indonesia, terutama mengenai 3 pilar utama bantuan yatu, bantuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan oleh sektor swasta, bantuan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan bantuan terhadap perdamaian dan keamanan. Pemerintah Jepang tetap akan meneruskan bantuan tersebut. Hal ini dikarenakan keinginan pemerintah Jepang untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan Indonesia tidak akan berubah. Bahkan dalam waktu dekat Wakil Menteri Luar Negeri tersebut juga menjelaskan pemerintah Jepang akan memberikan pinjaman dalam bentuk Yen kepada pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia dan pembangunan infrastruktur serta iklim investasi di Indonesia, walaupun jumlah pinjaman yang dimaksud tidak disebutkan. Rencana kerjasama lain yang ditawarkan adalah rencana bersama Indonesia untuk membentuk kerjasama pembentukan negara tangguh penanggulangan bencana alam.[8]

---

[8] *Tsunami Tidak Pengaruhi Bantuan Ke Indonesia*. http://dunia.vivanews.com/news/read/209930-

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

"*Mengapa Jepang masih menyalurkan ODA ke Indonesia pasca Gempa dan Tsunami 11 Maret 2011?*"

Kerangka Teori

Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri

Dalam menjelaskan fenomena atas alasan dari kepentingan politik Jepang terhadap masih berlangsungnya pemberian bantuan ODA untuk Indonesia pasca gempa dan tsunami 11 Maret 2011, penulis akan mendekati permasalahan dengan menggunakan konsep atau kerangka dasar pemikiran yang berhubungan dengan fenomena tersebut, yaitu *Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri*. Dalam studi hubungan Internasional, kita mendapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan terdiri atas pola – pola yang diwujudkan oleh suatu Negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan Negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya.

Teorisasi dalam hubungan Internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Alison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison, yaitu *model aktor rasional, model proses organisasi dan model politik birokratik.* Untuk dapat menjelaskan permasalahan diatas penulis menggunakan model **aktor rasional**. Dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional sebagai yang terutama. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogikan sebagai dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang di ambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaah kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.[9]

Model aktor rasional lebih dipilih oleh penulis daripada model proses organisasi dan model politik birokratik dalam proses menjawab kajian skripsi ini adalah karena dalam situasi pasca bencana gempa dan tsunami 11 Maret 2011 di Jepang, Pemerintah Jepang merupakan aktor individu tunggal yang harus berpikir dan bertindak cepat dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang harus diambil untuk segera mengatasi permasalahan yang terjadi demi kepentingan nasional Jepang sendiri. Perumusan

ataupun pembahasan masalah terkait dengan birokrasi politik maupun organisasi internasional dirasa akan memperlama waktu pengambilan keputusan dan tindakan. Hal ini akan menjadi berbeda apabila situasi yang terjadi bukanlah situasi yang sangat mendesak. Dalam model ini para pembuat keputusan, yaitu Pemerintah Jepang, dianggap rasional dan umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Kelemahannya asumsi ini mengabaikan fakta bahwa para pembuat keputusan itu adalah manusia yang bisa membuat kesalahan dan yang selalu menghadapi berbagai kendala eksternal dari birokratnya sendiri, dari berbagai kelompok kepentingan , opini publik dan sebagainya, terutama dalam sistem demokrasi.

Teori Bantuan Luar Negeri dengan Perspektif Realisme

Sistem internasional yang anarki menciptakan kebebasan otonomis diantara negara-negara. Hal tersebut membuat sebuah sistem internasional yang terdesentralisasi dimana setiap negara adalah berdaulat, menggunakan power mereka diatas sebuah "*defined territory, a population and a government*" saat terlibat pada hubungan/permainan power politik dengan negara lainnya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, bantuan internasional/bantuan luar negeri (foreign aid) praktis hanya menjadi sebuah alat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional. Alat kebijakan ini dalam pandangan realis dilihat sebagai sebuah hasil dari perang dingin yang digunakan dalam kompetisi diantara kekuatan great power. Bantuan internasional di pandang sebagai sebuah senjata kunci dalam perang dingin untuk memperbesar kemungkinan keseliasinya negara-negara dunia ketiga kedalam salah satu kubu great power. Motivasi

politik itulah yang menurut morghentau menjadi hal yang di pertimbangkan oleh donor saat memberikan bantuan luar negeri.

Kehadiran bantuan internasional dianggap sebagai sebuah instrument kebijakan sejak adanya kepentingan luar negeri yang tidak dapat di amankan dengan penanganan militer dan untuk mendukung metode diplomasi yang sebenarnya "tradisional" namun dalam koridor yang lebih pantas. Selain kegunaan bantuan internasional sebagai instrument untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri, dalam prakteknya muncul bahwa kebijakan bantuan luar negeri mencakup pula banyak disparitas tujuan dan kegiatan, sebagai respon dari berbagai macam kebutuhan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, berhubungan maupun tidak berhubungan pada tujuan politik sebuah kebjakan luar negeri.

Salah satu tokoh *central* realism, Morgenthau, dalam artikelnya yang berjudul *A Political Theory of Foreign Aid* mencoba untuk mengembangkan tipologi dari bantuan internasional. Ia mengidentifikasi lima tujuan kebijakan bantuan luar negeri, yaitu: military, prestige, humanitarian, economic, dan subsistence. Tipologi ini di angkat untuk mengorganisasikan kompleksitas kebijakan yang di labeli dengan nama "foreign aid". Berdasarkan hal ini maka ada dua tipe strategi yang di gunakan untuk mendapatkan pengaruh: propaganda dan suap (propaganda and bribes). Sebagian besar tipe bantuan internasional yang di identifikasi bersifat politis, hanya sedikit yang sifatnya *humanitarian foreign aid.* Artinya, hal yang seharusnya bersifat non politis kemudian

Bagi realis, bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi di pahami dengan cara yang sangat sederhana. Bantuan itu di pandang berfungsi hanya sebagai suap saat harapan-harapan lain yang bersifat non politis cuma akan membawa pada kekecewaan. Morghentau menolak argumentasi pendukung bantuan bahwa bantuan internasional sebenarnya di gunakan sebagai instrument penguat kapasitas demokrasi yang selanjutnya akan menjadi dasar terciptanya perdamaan dunia.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, bantuan internasional seringkali kurang sukses. namun bagi para pendukungnya kesuksesan bantuan internasional tidak hanya berdasarkan pada hal-hal yang secara tegas berhubungan dengan ekonomi, namun lebih kepada prakondisi intelektual, moral dan politik yang secara langsung tidak berhubungan dengan manupulasi ekonomi, jikapun berhubungan hanya pada bagian kulit manipulasi ekonominya saja. Hal penting yang coba di katakan oleh realis adalah bagaimana pengaruh praktek bantuan internasional terhadap penipisan konsep kedaulatan.

Bantuan luar negeri akan tetap menjadi masalah yang mengundang pro kontra apabila hanya bergerak pada ranah teknis/ekonomi dalam prakteknya. Yang di butuhkan adalah integrasi dari foreign aid ke dalam kebijakan Negara penerima bantuan (recipient country) dan dalam waktu yang sama di jaga oleh kondisi politik. Di luar itu, kebijakan bantuan luar negeri tidak ada bedanya dengan dengan kebijakan diplomatik atau propaganda. Sesungguhnya adalah senjata politik bagi sebuah negara.

Masalah utama bagi usaha realis dalam menjelaskan praktek *foreign aid* adalah mereka menyangkal tujuan bantuan luar negeri adalah untuk "menolong pembangunan sebuah negara", saat melakukannya, realis gagal untuk meng-konstruksikan kerangka teoritis bagaimana seharusnya langkah-langkah yang perlu di lakukan agar tujuan "helping countries develop" dapat tercapai. Realism sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi foreign aid terhadap pembangunan ekonomi. "Bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi" dalam pandangan realis hanyalah *label* pada kebijakan Negara dalam mengejar power dan supremasi. Efektivitas bantuan luar negeri bagi realism di evaluasi berdasarkan seberapa loyal negara-negara resipien kepada donor mereka. Bagaimanapun, dalam prakteknya, gambaran yang lebih rumit dapat terlihat dalam praktek bantuan internasional di mana lebih dari 20 donor terlibat dalam satu negara yang membuat usaha penjelasan teoritisnya akan tergoncang.

Transformasi dari rezim internasional untuk bantuan luar negeri dalam satu decade terakhir membuat pemahaman realis tidak banyak berguna dalam beberapa kasus, contohnya praktek bantuan yang di lakukan melalui mekanisme institusi multilateral. Model institusi seperti ini lebih terlihat independen dari kepentingan-kepentingan donor. Hal ini bertolak belakang dengan rekomendasi Morghentau tentang bantuan luar negeri, bantuan untuk pembangunan ekonomi telah memunculkan harapan baru dalam konteks pembangunan ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang.[10]

---

[10] *Teori Bantuan Luar Negeri dalam Persepktif Realisme dan Liberalisme*. 2011. International Development Studies. http://civiculture.wordpress.com/2009/06/24/bantuan-luar-negeri-dalam-teori-

Dengan mengoperasionalisasikan Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri model aktor rasional dan Teori Bantuan Luar Negeri dengan Perspektif Realisme dalam kasus Jepang masih menyalurkan bantuan ODA ke Indonesia Pasca Gempa dan Tsunami 11 Maret 2011 dapat diketahui motivasinya dari table berikut:

Tabel 1.1.

Tabel Untung Rugi Jepang Sebagai Aktor Rasional Atas Kebijakan Pemberian ODA Terhadap Indonesia

Indikator	**Melanjutkan Bantuan ODA ke Indonesia**		**Mengurangi/Menghilangkan Bantuan ODA ke Indonesia**	
	Untung	*Rugi*	*Untung*	*Rugi*
Pasokan SDA	Jaminan akan tercukupinya kebutuhan SDA dalam jumlah besar, terutama di bidang bahan tambang dan perindustrian	Tidak ada kerugian, karena pasokan SDA yang diperoleh bisa melebihi pemberian bantuan ODA	Tidak ada keuntungan bagi Jepang apabila kehilangan Indonesia, sebagai negara penyuplai SDA	Kerugian besar akan dialami Jepang ketika terjadi putusnya pasokan SDA
Investasi	Keuntungan yang besar, investasi Jepang di Indonesia dapat berkembang pesat	Tidak ada kerugian dalam bidang investasi	Tidak ada keuntungan yang diperoleh apabila kehilangan Indonesia yang merupakan pasar investasi utamanya	Kerugian besar apabila kemudian investasi – investasi Jepang dicabut, khususnya dari sektor industri dan otomotif

Terlihat dalam tabel diatas bahwa sangatlah besar keuntungan yang diperoleh

kerugian yang dialami Jepang akan sangat besar ketika melakukan pengurangan/penghentian ODA kepada Indonesia. Jadi operasionalisasi kedua teori yang digunakan dapat menjelaskan bagaimana Jepang sebagai aktor rasional harus memutuskan kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia, khususnya dalam pemberian ODA, yang akan menguntungkan bagi pihak Jepang.

Hipotesa

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan dan dioperasionalisasikan dengan teori yang ada, maka dapat dirumuskan dugaan sementara alasan – alasan mengapa Jepang masih menyalurkan ODA ke Indonesia Pasca Gempa dan Tsunami 11 Maret 2011 adalah bahwa Jepang sebagai aktor rasional melihat lebih menguntungkan untuk melanjutkan bantuan ODA kepada Indonesia bagi keamanan pasokan sumber daya alam dan Investasi – Investasinya.

Metode Penelitian

Dalam proses pencarian dan pengumpulan data, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanasi dan analitis. Penelitian ini lebih banyak didukung oleh literasi kepustakaan dalam teknik pengumpulan, sehingga eksplorasi data bersifat studi kepustakaan (libary research). Oleh karena itu, pengumpulan data akan dilakukan melalui kajian literasi seperti media pustaka, majalah, surat kabar, jurnal dan sumber-

didukung melalui persediaan data yang ada di internet maupun sumber lain yang diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahn yang dikaji.

Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dilakukan sejak setelah terjadinya bencana alam gempa dan tsunami yang menimpa Jepang pada 11 Maret 2011 yang lalu sampai dengan Desember 2011 tentang pemberian ODA Jepang kepada Indonesia pra dan pasca bencana dahsyat itu.

Sistematika Penulisan

I: Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan memberikan gambaran mengenai topik bahasan.

II: Bab ini akan menjelaskan mengenai Hubungan Diplomatik Bilateral Indonesia – Jepang, Sejarah ODA hingga Pemberian ODA Jepang untuk Indonesia

III: Bab ini menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa Gempa dan Tsunami di Jepang Maret 2011 yang telah membawa dampak buruk pada situasi perekonomian Jepang.

IV: Bab ini membuktikan hipotesa berlangsungnya Pemberian ODA kepada Indonesia Pasca Gempa dan Tsunami 11 Maret 2011, motivasi-motivasi yang ada dibaliknya dan

V: Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pokok permasalahan yang telah di bahas dari Bab I hingga Bab IV.